



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama satu tahun. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029..

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 pada umumnya dan dalam meningkatkan kineija Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Kuala Tungkal, Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH, S.STP,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	18
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
 Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	 21
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan Perangkat Daerah	24
3.3. Sasaran Staregis Perangkat Daerah	25
3.4. Staregi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	29
 BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	 35
4.1. Program dan Kegiatan	35
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	47
4.3. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	61
 Bab IV Penutup	 68
4.1. Catatan Penting	68
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	68
4.3. Rencana Tindak lanjut	69

LAMPIRAN

TABEL

Halaman

Tabel Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I	
Tahun 2026	9
Tabel Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah	26
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026	27
Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.....	30
Tabel Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekreatriat Daerah tahun 2026.....	37
Tabel Rumusan Perubahan Program Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026	46
Tabel Rumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026	48
Tabel Tujuan, Sasran dan Indikator Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026	62
Tabel Indikator Kinerja Utama Penyelenggara Bidang Urusan Tahun 2026	64
Tabel Indikator Kinerja Daerah Penyelenggara Bidang Urusan Tahun 2026	65
Tabael Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggara Bidang Urusan Tahun 2026	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini disusun mengacu pada Hasil evaluasi triwulanan/semesteran pelaksanaan Renja berjalan, yang membuktikan ada hambatan, keterlambatan, atau ketidakcocokan rencana vs realisasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2026 berorientasi kepada pencapaian hasil atau Outcome. Oleh karena itu, berkenaan dengan program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Proses penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 didasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perencanaan dan keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republika Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Agar Rencana Kerja tetap relevan, realistis, dan dapat dilaksanakan;
2. Anggaran dan kegiatan tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan nyata
3. Tetap selaras dengan dokumen perencanaan tingkat lebih tinggi dan kebijakan daerah
4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kinerja.

BAB. I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renja, Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat uraian mengenai: Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Developmnet Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub Bab ini memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja terhadap program dan kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Program Kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sub Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sub Bab ini memuat penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan pendanaan rencana kerja yang tertuang pada program dan kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar ter dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabar perencanaan tahunan dari rencana strategis (RENSTRA 2025-2029). Pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja, tidak terlepas dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan terus dilakukan dengan menyesuaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dan ketersediaan anggaran serta program prioritas daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada hasil capaian target kinerja yang telah ditentukan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara periodik, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja dilaksanakan setiap triwulan, semesteran dan akhir tahun pada tahun Renja berlajalan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian target dengan tujuan untuk mempertahankan maupun memperbaiki dari kualitas pelayanan publik.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga sebagai dasar dalam menentukan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (TW I)	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	TARGET PROGRAM /KEGIATAN (TW I)	ANGGARAN (TW I)	CAPAIAN KINERJA (TW I)	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN (TW I)	CAPAIAN ANGGARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4				6			
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efesian	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)	25%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		7.754.407.122	20%	19,44%	3.802.520.851	Bagian Perencanaan & Keuangan
				Persentase dokumen perencanaan Sekretariat daerah selaras dengan RPJMD	25%	8.262.000	20%	18%		
				Persentase terpenuhinya komponen dokumen SAKIP dengan bobot 80	25%		23%			
				Persentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran setda	18%		14%			
				Persentase kualitas laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Evaluasi Kinerja Setda	15%		13%		900.000	
				Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan keuangan yang dilaksanakan	25%		20%			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	8.262.000	1 Dok		900.000	

				Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	0	1 Dok			
		Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	18%	Persentase Laporan Keuangan tersusun dengan baik dan Benar	25%	4.695.209.651	18%	18%	2.603.468.958	Bagian Perencanaan & Keuangan
		Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)	10%	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	132 Orang	4.506.611.151	132 Orang		2.436.238.958	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dok	188.598.500	25%		167.230.000	
				Persentase Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan	25%	2.510.111.000	25,00%		1.011.636.000	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap	2.510.111.000	3 Lap		1.011.636.000	
				Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, biaya operasional KDH dan WKDH	25,0%	540.824.471	25%		186.515.893	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan kDH dan WKDH	2 Orang	175.824.471	2 Orang		49.349.038	
				Jumlah Paket pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	0 Paket	77.600.000	0,0%		0	
				Pelaksanaan Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	152.400.000	2 Orang		2.166.855	
				Penyediaan dana Operasional KDH dan WKDH	2 Orang	135.000.000	2 Orang		135.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	86,5	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	25%	3.622.500.750	25%	23,43%	2.481.341.726	BAGIAN UMUM
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	25,00%	301.786.550	25%		113.103.241	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	59.188.000	1 Paket		55.500.600	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diSediakan	2 Paket	162.044.800	0 Paket		0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.553.750	1 Paket		57.602.641	
			Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	25%	2.195.260.800	16,7%		1.653.987.928	Bagian Umum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0 Laporan	472.900.000	1 Lap		390.457.928	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0 Laporan	1.722.360.800	0 Lap		1.263.530.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25%	508.258.500	27%		262.236.959	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	437.708.500	24 Unit		262.236.959	
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	160 Unit	70.550.000	0 Unit		0	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di Rehabilitasi	4 Unit	0	0 Unit		0	
			Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	25%	617.194.900	25%		452.013.598	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah yang diSediakan	1 Paket	451.167.800	1 Paket		320.251.348	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 Paket	136.828.400	1 Paket		117.124.150	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di Sediakan	1 Paket	29.198.700	1 Paket		14.638.100	
		Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B)	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukasn Survey	25%	49.935.000	25%	13,00%	-	Bagian Organisasi
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata laksana		-				

		Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B)		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKJiP	15%	49.935.000	15%		-	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	49.935.000	1 Dok		-	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)		Persentase Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Minimal Sedang/Tinggi	0%	-	0%		-	Bagian Organisasi
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	0%	-	0%		-	
		Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	0,00	Persentase kegiatan pimpinan yang Mendapatkan Pelayanan	25,00%	420.307.000	24,71%	24,79%	149.210.840	Bagian Prokopim
				Persentase Kegiatan Fasilitas komunikasi Pimpinan	25,00%		24,67%			
				Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	25,00%		25,00%			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	0 Laporan	55.800.000	0 Laporan		0	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	64.190.000	0 Laporan		5.150.000	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Pimpinan	0 Laporan	300.317.000	0 Laporan		144.060.840	
2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitas kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai/Skor LPPD (Angka)	3,2	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		48.694.500		14,47%	9.200.000	Bagian Tata Pemerintahan
				Persentase keterisian data IKK LPPD	100%		15%	15,75%		
				Persentase keterisian data penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dari 8 (delapan) perangkat daerah pengampu	100%		20%			
				Jumlah Penetapan administrasi batas wilayah kecamatan dan kelurahan	1 Kec. 1 Kel		18%			
				Jumlah Rapat Koordinasi dan pembinaan camat	1 Kali Rakor		10%			
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 Dok	39.744.500	10%		1.000.000	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0 Dok	1.175.000	2000%		800.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 Dok	7.775.000	1800%		7.400.000	
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)	-	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	2	358.013.000	25%	13%	265.027.581	Bagian Kesra
		Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	25%	Jumlah Masjid Paripurna	0		0%			
				Jumlah lembaga keagamaan yang mendapat bantuan hibah	0		0%			
				Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat	25%		25%			
				Jumlah Dokumentasi Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	1 Dok	46.960.000	1 Dok		2.875.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Pendudukan dan KB	2 Dok.	207.553.000	2 Dok		163.302.581	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kerasipan, Tratibum Linmas	1 Dok.	103.500.000	1 Dok		98.850.000	
		Indeks Reformasi Hukum	0,00%	Jumlah Raperda yang diharmonisasi dan difasilitasi	1	912.350.806	25%	18,75%	87.600.000	Bagian Hukum
				Jumlah Raperbup yang diharmonisasi dan difasilitasi	5		25%			
		Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	25%	Jumlah Kasus litigasi yg difasilitasi	1		-			
				Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	25%		0%			
				Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	25%		25%			

				Jumlah Produk Hukum Daerah yang di Susun	1 Dok	6	1 Dok		27.000.000	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	1 Kasus	457.400.000	0 Kasus		21.000.000	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dok	454.950.800	1 Dok		39.600.000	
		persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)	25%	Jumlah naskah kerjasama antar daerah/lembaga yang difasilitasi	3	502.729.600	3	11,67%	0	Bagian Kerjasama
				Persentase Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	15%		10%			
				Jumlah fasilitas kegiatan kerjasama luar negeri	-		0%			
				persentase monitoring dan evaluasi implemnetasi Kerjasama	25%		25%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	0 Dok	350.219.600	0 Dok		0	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	1 Dok	25.280.000	1 Dok		0	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	1 Lap	127.230.000	1 Lap		0	
3.	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	25%	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	25%	4.976.851.000		18,17%	2.479.881.000	Bagian Perekonomian
				Persentase fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sektor ekonomi dan pengelolaan BUMD	25%		25%	20%		

		Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)	0	Jumlah BUMD yang dibina	1 BUMD		1 BUMD			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dok	4.959.791.000	1 Dok		2.476.696.000	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Lap	14.760.000	1 Lap		2.585.000	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dok	2.300.000	1 Dok		600.000	
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)	36%	Persentasi terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen program/ kegiatan pembangunan daerah	25,00%	27.505.000	18%	14%	0	Babuan ADP
		Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)		Persentase pematauan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah	25,00%		10%			
				Persentase laporan evalausi program/kegiatan pembangunan daerah	25,00%		15%			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	16.140.000	.18%		0	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	5.588.000	.10%		0	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap.	5.777.000	.15%		0	

		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)	44,68%	Persentase kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan PBJ	25%	-	18%	20,67%	-	Bagian PBJ
				Persentase Layanan Secara Elektronik	25%		22%			
				Tingkat kematangan standar layanan PBJ	Level 3		22%			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	0	-	0		-	
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	10 Dok	-	10 Dok		-	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	0		0		-	
		Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)	25%	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1	23.320.000	1	18%	0	Bagian Sumber Daya Alam
				Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	1		1			
				Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Energi dan Air	1		1			
				Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	25%	8.540.000	20%		0	

			Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25%	7.640.000	18%		0	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	25%	7.140.000	16%		0	
RATA -RATA TOTAL CAPAIAN KINERJA SETDA TRIWULAN I					18.696.613.778		17,36%	9.274.781.998	

Berdasarkan tabel Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan I tahun 2026 diatas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun berjalan, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian Kinerja Sekretariat Daerah pada triwulan I tahun 2026 rata-rata sebesar 17,36 persen dari target 20 persen, hal ini menggambarkan bahwa kinerja belum maksimal, akan tetapi ada komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh pegawai sekretariat daerah untuk memperbaiki pada triwulan berikutnya. Namun dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diminimalisir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan kondisi ideal organisasi Sekretariat Daerah yang diharapkan dengan kendala yang dinilai saat ini belum terpenuhi dapat diproyeksikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh Sekretariat Daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif.
2. Tersedianya kerangka gerak berupa pedoman yang terstandarisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (regulation), pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowering) dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi pemerintahan yang baik.

3. Pelaksanaan kewenangan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan secara efektif dengan adanya proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara obyektif.
4. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang yang terlihat dan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja akan lebih optimal dan berorientasi pada pencapaian tujuan.
5. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara esensial menunjang pada implementasi pelaksanaan otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya budaya kerja yang tinggi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal
3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
5. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
6. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
7. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
8. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
9. Belum optimalnya penyerapan PAD
10. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan

11. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien
12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
14. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengari kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
4. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah
5. Adanya peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
6. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
7. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
8. Belum semua perangkat daerah memahami mekanisme kerjasama daerah
9. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
10. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
11. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
12. Pengelolaan aset yang belum optimal
13. Belum optimalnya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh perangkat daerah
14. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya.

2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi -asosiasi maupun dan unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tatanan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

Pada Program Pembinaan Nasional tercantum Visi Pembangunan Nasional yaitu **"Bersama Menuju Indonesia Emas 2045"**

Sementara itu Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan pada Visi Pembangunan Nasional yang tercantum pada pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025–2039 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani" (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Mandiri dan Berinovasi)"**.

Adapun Makna yang terkandung dalam **Visi** tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. **Berkualitas** : Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang “Berkah Madani”. SDM yang unggul akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global;
2. **Ekonomi Maju** : Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam pencapaian visi Berkah Madani Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui pilar Ekonomi Maju, pemerintah daerah menitikberatkan pada strategi peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan daya saing daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. **Religius** : Nilai-nilai religius menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian;
4. **Kompetitif** : Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Pilar Kompetitif dalam visi Berkah Madani mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan akses pasar produk-produk daerah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional;
5. **Aman dan Harmonis** : Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Aman dan Harmonis* diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat;
6. **Mandiri** : Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap

bantuan eksternal. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Mandiri* menekankan pada upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik secara fiskal, ekonomi, maupun social;

7. **Inovatif** : Inovasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam visi Berkah Madani, unsur Inovatif diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap perubahan, berbasis pada kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Tahun kedepan dirumuskan dan ditetapkan 3 (Tiga) Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pemabangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

Berdasarkan Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggaris bawahi misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 pada point 2 (Dua) yaitu ***“Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”***

Dari misi point 2 (Dua) tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk menjalankan Misi tersebut dengan baik, akan tetapi untuk menjalankan Misi tersebut tidaklah mudah, berbagai permasalahan dalam menjalankan program pasti ada.

3.2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu : ***“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Mandiri dan Ber-Inpvasi)***, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026. Adapun Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bertanggungjawab”*** Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan layanan kepada masyarakat dengan standar yang lebih baik, cepat, transparan serta sesuai dengan aturan.

1. **Efektif** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan berupaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan selaga daya yang dimiliki.

2. **Efisien** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberikan pelayanan dengan penggunaan sumber daya yang hemat tanpa mengurangi kualitas.
3. **Akuntabel** : dalam memberikan pelayanan, semua proses pelayanan dapat secara transparan, baik secara hukum maupun kepada masyarakat.
4. **Bertanggung jawab** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya memberi layanan, tetapi juga memastikan layanan tersebut adil, sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

3.3. Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sedangkan Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa sasaran yang akan dicapai , antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/Lembaga.
3. Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	1. Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah 2. Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu 3. Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah 5. Nilai Kematangan Perangkat Daerah 6. Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B) 7. Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B) 8. Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	1. Nilai / Skor LPPD 2. Persentase bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan Sosial yang tersalurkan tepat sasaran 3. Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi 4. Indeks Reformasi Hukum 5. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan 6. Persentase Naskah MOU yang difasilitasi
3.	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1. Persentase Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor ekonomi 2. Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik 3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu 4. Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% 5. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE 6. Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI			Misi Ke 2		
MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT “BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis Mandiri dan ber-Inovasi)			Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(07)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT					
1. Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)	82,10	Bag. Renkeu
			Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	94	Bag. Renkeu
			Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)	93,00	Bag. Renkeu
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,5	Bag. Umum
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)	37	Bag. Organisasi
			Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)	43	Bag. Organisasi
			Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)	35	Bag. Organisasi
			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)	85	Bag. Prokopim

		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	Bag. Perekonomian
			Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)	1	Bag. Perekonomian
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)	80	Bag. ADP
			Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)	32	Bag. ADP
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)	100	Bag. PBJ
			Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)	100	Bag. SDA
		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai/Skor LPPD (Angka)	3,2 (Sedang)	Bag. Tapem
			Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	Bag. Kesra
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)	2	Bag. Kesra
			Indeks Reformasi Hukum	85	Bag. Hukum
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	Bag. Hukum
			persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)	100	Bag. Kerjasama

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuandan sasaran yang diteteapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai langkah-langka dan kerangka pemikiran atau kerangka kerja dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Staregi dan arah kebijakan Renstra Sekretaraiat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.2 sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja (RENJA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2026**

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)				
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bagian
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Meningkatkan Kapentensi SDM	Pendampingan, Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan serta keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan lingkup sekretariat	Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah	Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen pendukung penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah	Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan	asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Menata standar pelayanan administrasi	Penetapan standar pelayanan administrasi	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Umum
		Pembinaan tata naskah dinas	Peningkatan pemahaman tata naskah dinas	Bagian Umum
		Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal	Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik	Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel	Bagian Umum

		Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi	Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Menata standar pelayanan kerumahtanggaan	Penetapan standard pelayanan kerumahtanggaan	Bagian Umum
		Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumahtanggaan secara maksimal	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan	Peningkatan koordinasi dengan pimpinan	Bagian Umum
		Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan	Penetapan standard pelayanan keprotokolan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan	Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja	Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi
		Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Desk/asistensi tentang dokumen AKIP	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi	Bagian Organisasi
		Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid	Peningkatan koordinasi dengan OPD	Bagian Organisasi
		Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi	Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi	Bagian Organisasi

Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan antara perangkat daerah, dan kecamatan	Meningkatkan kualitas fasilitasi urusan pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan
	Mengoptimalkan fasilitas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung penataan wilayah dan Penguatan peran camat dan perangkat camat dalam pelayanan publik	Bagian Tata Pemerintahan
	Mendorong penyelesaian batas wilayah secara tertib dan akurat	Penyelesaian tapal batas dan perselisihan wilayah secara partisipatif	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Optimalisasi pemanfaatan anggaran hibah	Pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Meningkatkan peran serta dan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum	Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Bagian Hukum
	Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perangkat daerah	Bagian Hukum
	Optimalisasi dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi	Peningkatan akses informasi hukum bagi masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	Bagian Hukum
	Penguatan peran bagian hukum sebagai pengendali regulasi daerah	Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah	Bagian Hukum
	Pengembangan jejaring kerjasama strategis lintas sektoral dan wilayah	Mendorong kerjasama yang berbasis potensi dan kebutuhan daerah	Bagian Kerjasama
	Menata prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama	Menyederhanakan proses administrasi kerjasama sesuai regulasi terkait kerjasama daerah	Bagian Kerjasama
	Optimalisasi fungsi fasilitasi, mediasi, kerjasama daerah	mengembangkan sistem informasi kerjasama yang terintegrasi dan transparan	
	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	koordinasi,fasilitasi untuk menjaring mitra strategis baik dari pemerintah, swasta, maupun luar negeri	Bagian Kerjasama

Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi	Penguatan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah	Bagian Perekonomian
	Meningkatkan peran fasilitasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan perekonomian	Penguatan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Pengutan pembinaan dan pengawasan BUMD	Bagian Perekonomian
	Meningkatkan Tata Kelola BUMD	Penataan Standar pengelolaan BUMD	Bagian Perekonomian
	Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
	Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian ADP
	Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian PBJ
	Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Bagian PBJ
	Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Bagian PBJ
	Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan fasilitas pengelolaan sumber daya alam		Bagian SDA
	Mendorong pemanfaatan sumber daya alam daerah secara optimal dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan tentang pengelolaan SDA berkelanjutan melalui koordinasi dan fasilitasi	Bagian SDA
	memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perizinan, konservasi dan rehabilitasi	Bagian SDA
	Memastikan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui koordinasi dan fasilitasi	Koordinasi dan Fasilitasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	Bagian SDA

Selanjutnya Sasaran Strategi dimaksud merupakan dasar dalam perumusan program dan kegiatan serta subkegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan serta sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya APBN dan atau daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencan Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Sekretariat Daerah dengan 3 (Tiga) Program diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rincian 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 6 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dibawah kendali Bagian Organisasi, serta 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dipertanggung jawabkan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan rincian 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dikerjakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan 1 kegiatan 3 sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Hukum, serta 1 kegiatan 3 sub kegiatan oleh Bagian Kerjasama.

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh 4 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Sumber Daya Alam yang masing-masing melaksanakan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Adapun rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efesian			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)		
					Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)		
					Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)		
					Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)		
					Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)		
					Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)		4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

				Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah				Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian (%)		
Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)							

		pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)		
					Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)		
					Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)		
					Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tersediannya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	

				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
					Nilai/Skor LPPD (Angka)		

		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga			Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%) Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*) Indeks Reformasi Hukum Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%) persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Nilai/Skor LPPD (Angka) Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

				Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	

**RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM RENCANA KERJA TAHUN 2026					CATATAN	PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2026		BERTAMBAH / BERKURANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN / PAGU DPA	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)=10-06	11
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				103.859.410.637	43.680.603.761				72.618.108.761	28.937.505.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				82.017.877.247	34.971.197.9				62.492.467.961	27.521.270.0	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	Tanjab Barat	100	82.017.877.247	34.971.197.961	APBD		100	62.492.467.961	27.521.270.000	Bagian Renkeu,Umum,

	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	Tanjab Barat	100					100			Organisasi da Prokopim Setda
	Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)	Tanjab Barat	79,55					79,55			
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14.217.402.390	3.339.126.800				4.791.751.800	1.452.625.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai/Skor LPPD (Angka)	Tanjab Barat	3,2 (Sedang)	14.217.402.390	3.339.126.800	APBD		3,2 (Sedang)	4.791.751.800	1.452.625.000	Bagian Tapem, Kesra, Hukum & Kerjasama
	Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	Tanjab Barat	100					100			
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				7.624.131.000	5.370.279.000				5.333.889.000	- 36.390.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	Tanjab Barat	100	7.624.131.000	5.370.279.000	APBD		100	5.333.889.000	36.390.000	Bagian Ekonomi, ADP, PBJ dan SDA
	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	Tanjab Barat	100					100			
TOTAL KESELURUHAN				103.859.410.637	43.680.603.761				72.618.108.761	28.937.505.000	

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan, namun seiring dengan kebijakan dan efisiensi anggaran maka prakiraan kebutuhan anggaran akan mengalami perubahan dan penyesuaian target kinerja serta kemampuan anggaran yang tersedia sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan "Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD). Oleh karena itu Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja, target, pagu Perubahan untuk tahun 2026 beserta sumber dana kegiatan, sebagai berikut :

**RUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 SEBELUM PERUBAHAN					CATATAN PENTING	PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2026		BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
		LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	Sebelum Perubahan/ Pagu DPA	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	11 = (10-06)	(11)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				103.859.410.637	43.680.603.761	APBD			72.599.988.761	28.919.385.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				82.017.877.247	34.971.197.961	APBD			62.474.347.961	27.503.150.000	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	Tanjab Barat	100	82.017.877.247	34.971.197.961	APBD		100	62.474.347.961	27.503.150.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	Tanjab Barat	100					100			
	Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)	Tanjab Barat	79,55					81,82			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tanjab Barat		736.069.463	19.602.000	APBD			19.602.000	0	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Sekretariat daerah selaras dengan RPJMD	Tanjab Barat	100%	736.069.463	19.602.000	APBD		100%	19.602.000	0	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
	Persentase terpenuhinya komponen dokumen SAKIP dengan bobot 80	Tanjab Barat	94%					95%			
	Persentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran setda	Tanjab Barat	81,00%					81,35%			
	Persentase kualitas laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan Evaluasi Kinerja Setda	Tanjab Barat	80,10%					80,50%			
	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan keuangan yang dilaksanakan	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				260.250.000	15.078.000				15.078.000	-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Tanjab Barat	4	260.250.000	15.078.000	APBD		6	15.078.000	-	
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				110.877.963	-				-	-	

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Tanjab Barat	1	110.877.963	-	APBD		0	-	-	
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				109.071.500	-				-	-	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Tanjab Barat	1	109.071.500	-	APBD		0	-	-	
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				160.125.000	4.524.000				4.524.000	-	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Tanjab Barat	4	160.125.000	4.524.000	APBD		6	4.524.000	-	
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.745.000	-				-		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Tanjab Barat	2	95.745.000	-	APBD			-		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tanjab Barat		30.122.449.928	18.026.173.679	APBD			18.008.053.679	18.120.000	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan tersusun dengan baik dan Benar	Tanjab Barat	100%	30.122.449.928	18.026.173.679	APBD		100%	18.008.053.679	-	
	Persentase laporan keuangan bulanan/triwulan/tahunan yang disampaikan tepat waktu	Tanjab Barat	100%					100%		18.120.000	
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.732.150.443	17.312.395.179				17.312.395.179	-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Tanjab Barat	131	28.732.150.443	17.312.395.179	APBD		132	17.312.395.179	-	
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.092.450.000	713.778.500				695.658.500	18.120.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Tanjab Barat	1	1.092.450.000	713.778.500	APBD		1	695.658.500	18.120.000	
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				190.125.000	-				-	-	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Tanjab Barat	1	190.125.000	-	APBD		1	-		
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				107.724.485	-				-	-	

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Tanjab Barat	2	107.724.485	-	APBD	2	-		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tanjab Barat		170.250.000	-	APBD		-	-	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola dengan Baik	Tanjab Barat	100%	170.250.000	-	APBD	100%	-	-	
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				170.250.000	-			-	-	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	170.250.000	-	APBD	1	-		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tanjab Barat		982.650.000		APBD		650.000.000	650.000.000	Bagian Umum
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	Tanjab Barat	100%	982.650.000		APBD	100%	650.000.000	650.000.000	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Tanjab Barat	100%				100%			
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				982.650.000	-			650.000.000	650.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Tanjab Barat	5	982.650.000	-	APBD	5	650.000.000	650.000.000	
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-			-	-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Tanjab Barat	12	-	-	APBD	24	-	-	
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tanjab Barat		14.445.175.000	5.493.640.800	APBD		12.948.640.800	7.455.000.000	Bagian Umum
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	Tanjab Barat	100%	14.445.175.000	5.493.640.800	APBD	100%	12.948.640.800	7.455.000.000	
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				270.000.000	59.188.000			559.188.000	500.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	2	270.000.000	59.188.000	APBD	2	559.188.000	500.000.000	
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.480.000.000	168.080.800	APBD		2.168.080.800	2.000.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	3	1.480.000.000	168.080.800	APBD	3	2.168.080.800	2.000.000.000	
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000	-			-	-	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	2	55.000.000	-	APBD	3	-	-	
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.837.850.000	396.150.000			3.396.150.000	3.000.000.000	

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	5	1.837.850.000	396.150.000	APBD		5	3.396.150.000	3.000.000.000	
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				219.000.000	-				455.000.000	455.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	2	219.000.000	-	APBD		2	455.000.000	455.000.000	
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				208.325.000	-				-		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Tanjab Barat	2	208.325.000		APBD		1	-	-	
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.375.000.000	4.870.222.000				6.370.222.000	1.500.000.000	Bagian Perencanaan & Keuangan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Tanjab Barat	12	10.375.000.000	4.870.222.000	APBD		12	6.370.222.000	1.500.000.000	
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tanjab Barat		6.326.100.000	-	APBD			7.300.000.000	7.300.000.000	Bagian Umum
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	Tanjab Barat	100%	6.326.100.000	-	APBD		100%	7.300.000.000	7.300.000.000	
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000.000	-				5.000.000.000	5.000.000.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Tanjab Barat	8	5.000.000.000	-	APBD		8	5.000.000.000	5.000.000.000	
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				800.000.000	-				800.000.000	800.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Tanjab Barat	2	800.000.000	-	APBD		2	800.000.000	800.000.000	
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				526.100.000	-				1.500.000.000	1.500.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Tanjab Barat	52	526.100.000	-	APBD		52	1.500.000.000	1.500.000.000	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tanjab Barat		14.053.140.000	6.323.767.800	APBD			8.853.767.800	2.530.000.000	Bagian Umum
Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	Tanjab Barat	100%	14.053.140.000	6.323.767.800	APBD		100%	8.853.767.800	2.530.000.000	
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.600.000	-				780.000.000	780.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2	20.600.000	-	APBD		2	780.000.000	780.000.000	
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.817.640.000	1.437.000.000				2.937.000.000	1.500.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Tanjab Barat	3	1.817.640.000	1.437.000.000	APBD		3	2.937.000.000	1.500.000.000	

4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				272.200.000	-				-	-	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tanjab Barat		272.200.000	-	APBD			-	-	
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				11.942.700.000	4.886.767.800				5.136.767.800	250.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tanjab Barat	1	11.942.700.000	4.886.767.800	APBD		1	5.136.767.800	250.000.000	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tanjab Barat		7.004.761.500	1.806.479.000	APBD			7.826.979.000	6.020.500.000	Bagian Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Konsidi Baik	Tanjab Barat	100%	7.004.761.500	1.806.479.000	APBD		100%	7.826.979.000	6.020.500.000	
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.369.126.500	1.268.839.000				3.768.839.000	2.500.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Tanjab Barat	150	4.369.126.500	1.268.839.000	APBD		150	3.768.839.000	2.500.000.000	
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				44.000.000	-				240.500.000	240.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Tanjab Barat	100	44.000.000	-	APBD		100	240.500.000	240.500.000	
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.275.530.000	262.800.000				1.762.800.000	1.500.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Tanjab Barat	960	1.275.530.000	262.800.000	APBD		960	1.762.800.000	1.500.000.000	
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.316.105.000	274.840.000				2.054.840.000	1.780.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Tanjab Barat	20	1.316.105.000	274.840.000	APBD		20	2.054.840.000	1.780.000.000	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tanjab Barat		1.988.319.924	1.248.683.782	APBD			1.149.183.782	99.500.000	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta biaya operasional KDH dan WKDH	Tanjab Barat	100%	1.988.319.924	1.248.683.782	APBD		100%	1.149.183.782	99.500.000	
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.143.049.700	321.483.782				235.483.782	86.000.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	Tanjab Barat	2	1.143.049.700	321.483.782	APBD		2	235.483.782	86.000.000	
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				99.770.224	77.600.000				64.100.000	13.500.000	

Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	8	99.770.224	77.600.000	APBD		6	64.100.000	13.500.000	-
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				135.000.000	309.600.000				309.600.000	-	
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	Tanjab Barat	8	135.000.000	309.600.000	APBD		8	309.600.000	-	
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				610.500.000	540.000.000				540.000.000	-	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	Tanjab Barat	2	610.500.000	540.000.000	APBD		2	540.000.000	-	
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Tanjab Barat		2.432.310.000	1.513.538.900	APBD			4.313.538.900	2.800.000.000	Bagian Umum
Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kantor dan Pimpinan	Tanjab Barat	100%	2.432.310.000	1.513.538.900	APBD		100%	4.313.538.900	2.800.000.000	
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1.744.060.000	1.045.311.800				2.545.311.800	1.500.000.000	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	3	1.744.060.000	1.045.311.800	APBD		3	2.545.311.800	1.500.000.000	
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				542.050.000	416.428.400				1.216.428.400	800.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	3	542.050.000	416.428.400	APBD		3	1.216.428.400	800.000.000	
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				146.200.000	51.798.700				551.798.700	500.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	Tanjab Barat	3	146.200.000	51.798.700	APBD		3	551.798.700	500.000.000	
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi		Tanjab Barat		1.531.906.432	119.005.000	APBD			119.005.000	-	Bagian Organisasi
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang/tinggi	Tanjab Barat	100%	1.531.906.432	119.005.000	APBD		100%	119.005.000	-	
	Persentase perangkat daerah yang dilakukan survei	Tanjab Barat	100%					100%			
	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan LKJIP tepat waktu	Tanjab Barat	100%					100%			

4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				442.282.000	12.500.000				12.500.000	-	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	Tanjab Barat	2	442.282.000	12.500.000	APBD		2	12.500.000	-	
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				539.192.432	53.025.000				53.025.000	-	
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	Tanjab Barat	2	539.192.432	53.025.000	APBD		2	53.025.000	-	
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				550.432.000	53.480.000				53.480.000	-	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	Tanjab Barat	2	550.432.000	53.480.000	APBD		2	53.480.000	-	
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Tanjab Barat		2.224.745.000	420.307.000	APBD			1.285.577.000	865.270.000	Bagian Prokopim
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang Mendapatkan Pelayanan	Tanjab Barat	100%	2.224.745.000	420.307.000	APBD		100%	1.285.577.000	865.270.000	
	Persentase Kegiatan Fasilitas komunikasi Pimpinan	Tanjab Barat	100%					100%			
	Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				428.814.000	55.800.000				60.300.000	4.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	Tanjab Barat	1	428.814.000	55.800.000	APBD		1	60.300.000	4.500.000	
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				485.026.000	64.190.000				156.760.000	92.570.000	
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	Tanjab Barat	1	485.026.000	64.190.000	APBD		1	156.760.000	92.570.000	
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1.310.905.000	300.317.000				1.068.517.000	768.200.000	
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	Tanjab Barat	1	1.310.905.000	300.317.000	APBD		1	1.068.517.000	768.200.000	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Tanjab Barat		14.217.402.390	3.339.126.800	APBD			4.791.751.800	1.452.625.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai/Skor LPPD (Angka)	Tanjab Barat	3,2 (Sedang)	14.217.402.390	3.339.126.800	APBD		3,4 (Sedang)	4.791.751.800	1.452.625.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	Tanjab Barat	100					100			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan		Tanjab Barat		408.299.000	108.894.500	APBD			180.269.500	71.375.000	Bagian Tapem
Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase keterisian data IKK LPPD	Tanjab Barat	100%	408.299.000	108.894.500	APBD		100%	180.269.500	71.375.000	
	Persentase keterisian data penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dari 8 (delapan) perangkat daerah pengampu	Tanjab Barat	100%					100%			
	Jumlah Penetapan administrasi batas wilayah kecamatan dan kelurahan	Tanjab Barat	1 Kec, 1 Kel.					1 Kec, 1 Kel.			
	Jumlah Rapat Koordinasi dan pembinaan camat	Tanjab Barat	1 Kali Rakor					1 Kali Rakor			

4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				197.376.000	92.844.500				156.819.500	63.975.000	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	Tanjab Barat	2	197.376.000	92.844.500	APBD		2	156.819.500	63.975.000	
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				81.100.000	6.400.000				6.400.000	-	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	Tanjab Barat	1	81.100.000	6.400.000	APBD		1	6.400.000	-	
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				129.823.000	9.650.000				17.050.000	7.400.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	Tanjab Barat	1	129.823.000	9.650.000	APBD		1	17.050.000	7.400.000	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Tanjab Barat		11.412.053.790	2.799.832.300	APBD			3.999.832.300	1.200.000.000	Bagian Kesra
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Tanjab Barat	7 Kegiatan	11.412.053.790	2.799.832.300	APBD		7 Kegiatan	3.999.832.300	1.200.000.000	
	Jumlah Masjid Paripurna	Tanjab Barat	1 Masjid					3 Masjid			
	Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan hibah	Tanjab Barat	45 Lembaga					40 Lembaga			
	Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8.376.295.790	1.756.977.300				2.956.977.300	1.200.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	Tanjab Barat	7	8.376.295.790	1.756.977.300	APBD		4	2.956.977.300	1.200.000.000	
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				2.808.058.000	939.355.000				939.355.000	-	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	Tanjab Barat	10	2.808.058.000	939.355.000	APBD		7	939.355.000	-	
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				227.700.000	103.500.000				103.500.000	-	

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	Tanjab Barat	2	227.700.000	103.500.000	APBD		2	103.500.000	-	
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum		Tanjab Barat		1.706.000.000	315.400.000	APBD			492.650.000	177.250.000	Bagian Hukum
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Raperda yang diharmonisasi dan difasilitasi	Tanjab Barat	10 Perda	1.706.000.000	315.400.000	APBD		10 Perda	492.650.000	177.250.000	
	Jumlah Raperbup yang diharmonisasi dan difasilitasi	Tanjab Barat	30 Raperbup					30 Raperbup			
	Jumlah Kasus litigasi yg difasilitasi	Tanjab Barat	2 Kasus					2 Kasus			
	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	Tanjab Barat	100%					100%			
	Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				426.000.000	65.250.000				123.000.000	57.750.000	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	Tanjab Barat	4	426.000.000	65.250.000	APBD		4	123.000.000	57.750.000	
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				650.000.000	98.250.000				157.500.000	59.250.000	
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	Tanjab Barat	2	650.000.000	98.250.000	APBD		2	157.500.000	59.250.000	
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				630.000.000	151.900.000				212.150.000	60.250.000	
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	Tanjab Barat	5	630.000.000	151.900.000	APBD		5	212.150.000	60.250.000	
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah		Tanjab Barat		691.049.600	115.000.000	APBD			119.000.000	4.000.000	Bagian Kerjasama
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah naskah kerjasama antar daerah/lembaga yang difasilitasi	Tanjab Barat	20 naskah kerja sama	691.049.600	115.000.000	APBD		10 naskah kerja sama	119.000.000	4.000.000	
	Persentase Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	Tanjab Barat	90%					91%			
	Jumlah fasilitas kegiatan kerjasama luar negeri	Tanjab Barat	1					1			
	persentase monitoring dan evaluasi implemnetasi kerjasama	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				358.619.600	90.622.000				93.522.000	2.900.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	Tanjab Barat	1	358.619.600	90.622.000	APBD		1	93.522.000	2.900.000	

4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				151.420.000	7.654.000				6.204.000	1.450.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	Tanjab Barat	1	151.420.000	7.654.000	APBD		1	6.204.000	1.450.000	
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				181.010.000	16.724.000				19.274.000	2.550.000	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	Tanjab Barat	2	181.010.000	16.724.000	APBD		2	19.274.000	2.550.000	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tanjab Barat		7.624.131.000	5.370.279.000	APBD			5.333.889.000	36.390.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	Tanjab Barat	100	7.624.131.000	5.370.279.000	APBD		100	5.333.889.000	36.390.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	Tanjab Barat	100					100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Tanjab Barat		5.865.654.000	4.987.471.000	APBD			4.987.471.000	-	Bagian Perekonomian
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sektor ekonomi dan pengelolaan BUMD	Tanjab Barat	100%	5.865.654.000	4.987.471.000	APBD		100%	4.987.471.000	-	
	Jumlah BUMD yang dibina	Tanjab Barat	3					3			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5.571.646.000	4.963.277.000				4.963.277.000	-	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	Tanjab Barat	2	5.571.646.000	4.963.277.000	APBD		2	4.963.277.000	-	
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				214.360.000	18.217.000				18.217.000	-	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	Tanjab Barat	1	214.360.000	18.217.000	APBD		1	18.217.000	-	
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil \				79.648.000	5.977.000				5.977.000	-	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	Tanjab Barat	1	79.648.000	5.977.000	APBD		1	5.977.000	-	
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Tanjab Barat		399.633.000	50.666.000	APBD			30.776.000	19.890.000	Bagian ADP
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentasi terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen program/ kegiatan pembangunan daerah	Tanjab Barat	100%	399.633.000	50.666.000	APBD		100%	30.776.000	19.890.000	

	Persentase pemantauan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah	Tanjab Barat	100%					100%			
	Persentase laporan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah	Tanjab Barat	100%					100%			
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				85.950.000	16.140.000				7.960.000	8.180.000	-
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	Tanjab Barat	1	85.950.000	16.140.000	APBD		1	7.960.000	8.180.000	-
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				98.755.000	11.668.000				6.248.000	5.420.000	-
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	Tanjab Barat	1	98.755.000	11.668.000	APBD		1	6.248.000	5.420.000	-
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				214.928.000	22.858.000				16.568.000	6.290.000	-
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	Tanjab Barat	1	214.928.000	22.858.000	APBD		1	16.568.000	6.290.000	-
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Tanjab Barat		810.000.000	239.023.000	APBD			239.023.000	-	Bagian PBJ
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan PBJ	Tanjab Barat	100%	810.000.000	239.023.000	APBD		100%	239.023.000	-	
	Persentase Layanan Secara Elektronik	Tanjab Barat	100%					100%			
	Tingkat kematangan standar layanan PBJ	Tanjab Barat	6/9 Level 3					6/9 Level 3			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				180.000.000	-				-	-	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	Tanjab Barat	200	180.000.000	-	APBD		250	-	-	
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				600.000.000	239.023.000				239.023.000	-	
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	Tanjab Barat	44	600.000.000	239.023.000	APBD		44	239.023.000	-	
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30.000.000	-				-	-	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Tanjab Barat	4	30.000.000	-	APBD		4	-	-	
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Tanjab Barat		548.844.000	93.119.000	APBD			76.619.000	16.500.000	Bagian SDA

Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tanjab Barat	4 Kali	548.844.000	93.119.000	APBD		4 Kali	76.619.000	16.500.000	
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	Tanjab Barat	4 Kali					4 Kali			
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Energi dan Air	Tanjab Barat	4 Kali					4 Kali			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				274.134.000	20.765.000				20.765.000	-	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	Tanjab Barat	1	274.134.000	20.765.000	APBD		1	20.765.000	-	
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				154.730.000	48.974.000				32.474.000	16.500.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	Tanjab Barat	1	154.730.000	48.974.000	APBD		1	32.474.000	16.500.000	
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				119.980.000	23.380.000				23.380.000	-	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	Tanjab Barat	1	119.980.000	23.380.000	APBD		1	23.380.000	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 membutuhkan pagu indikatif sebesar Rp. **72.599.988.761** (*Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) ada penambahan anggaran sebesar Rp. **28.937. 505.000** (*Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima ratus Lima Ribu Rupiah*) Dari Pagu DPA Tahun 2026, perubahan pagu tersebut untuk mendukung pencapaian pelaksanaan 3 (Tiga) Program 19 (Sembilan) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota merupakan program rutin atau non urusan yang terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan dengan Kebutuhan pagu dana indikatif sebesar Rp. **62.474.347.961,-** (*Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribua Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) atau bertambah sebesar Rp. **27.503.150.000** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dari Pagu DPA murni tahun 2026, dan dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Organisasi dan Bagian Protokoler dan komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat merupakan urusan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan dengan perubahan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. **4.791.751.800,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau bertambah Sebesar Rp. **1.452.625.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dari Pagu DPA murni tahun 2026, dan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan juga merupakan urusan Sekkretariat Daerah yang teridiri 4 (Empat) kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan, dengan perubahan kebutuhan Pagu Indikatif sebesar Rp. **5.333.889.000,-** (*Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau berkurang sebesar Rp. **36.390.000,-** (*Tiga Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dari Pagu DPA Murni tahun 2026, dan diklaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Sumber Daya Alam pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.3. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja Renstra dan RPJMD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbagi secara jelas pembagian urusan pemerintahan baik urusan absolut maupun urusan konkuren. Begitu juga urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan. Tentunya berbeda dengan dinas-dinas daerah yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan, maka ada beberapa indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2026**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Renja Tahun 2026	Peangnung Jawab
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)
1. Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)	82,10	Bag. Renkeu
			Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	94	Bag. Renkeu
			Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)	93,00	Bag. Renkeu
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,5	Bag. Umum
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)	37	Bag. Organisasi
			Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)	43	Bag. Organisasi
			Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)	35	Bag. Organisasi
			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)	85	Bag. Prokopim
		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	Bag. Perekonomian
			Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)	1	Bag. Perekonomian
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)	80	Bag. ADP
			Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)	32	Bag. ADP
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)	100	Bag. PBJ

			Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)	100	Bag. SDA
		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai/Skor LPPD (Angka)	3,2 (Sedang)	Bag. Tapem
			Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	Bag. Kesra
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)	2	Bag. Kesra
			Indeks Reformasi Hukum	85	Bag. Hukum
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	Bag. Hukum
			persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)	100	Bag. Kerjasama

Pada tabel 4.3. disampaikan bahwa indikator kinerja pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 19 indikator yang merupakan tolak ukur untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tabjung Jabung Barat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang mencerminkan dukungan Sekretariat Daerah dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Sasaran Strategis terbagi menjadi 3 (Tiga) katagori indikator yaitu :

1. Indikator Kierja Utama (IKU)

merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU adalah alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2026**

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	Target Kinerja 2026	Ket
1	2	3	4	5
1.	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	Nilai / Predikat	82,10 (A)	IKU
2.	Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	94%	IKU
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah	Nilai / Predikat	86,5	IKU
4.	Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B)	Jumlah	43	IKU
5.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Jumlah	35	IKU
6.	Nilai / Skor LPPD	Nilai / Skor	3,2 (Sdg)	IKU
7.	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat / Juara	Juara 2 Umum	IKU
8.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks/ Katagori	85	IKU
9.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	persentase	100%	IKU
10.	Persentase Naskah MOU yang difasilitasi	Persentase	100%	IKU
11.	Persentase pelaksanaa fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	persentase	100%	IKU
12.	Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	Jumlah	1	IKU
13.	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	Persentase	80%	IKU

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait dengan urusan Sekretariat Daerah yang tercantum dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai / Angka	37	IKD
2.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Jumlah	35	IKD
3.	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat / Juara	Juara 2 Umum	IKD
4.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100%	IKD
5.	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	Persentase	100%	IKD
6.	Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	Jumlah	32	IKD
7.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Persentase	100%	IKD

3. Indikator Kinerja Kunci

Salah satu program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah pembangunan **Religius (Ber-Ahlak dan Toleransi)**. Nilai-nilai religius merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mendorong penguatan peran lembaga keagamaan, rumah ibadah, dan tokoh-tokoh agama dalam pendidikan moral dan spiritual masyarakat. Program pembinaan mental-spiritual masyarakat serta kegiatan keagamaan lintas agama didorong untuk memperkuat rasa saling menghormati dan mempererat kohesi sosial di tengah keberagaman budaya dan keyakinan.

Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat bereperan penting dalam mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang **Relegius (Ber-Ahlak dan Toleransi)** melalui fungsi sekretariat daerah sebagai fasilitasi kebijakan, koordinasi dan administrasi dengan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Pemberian Sepeda Motor Untuk Para Da'i, dan Pemberian Honorarium. Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius dan berahlak, serta sebagai penghargaan atas dedikasi para tokoh keagamaan dan pelayan sosial di tengah masyarakat, Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan program pemberian sepeda motor untuk Da'i, honorarium bagi da'i, guru ngaji, pengurus masjid/musholla, guru pondok pesantren, dan petugas pemandian jenazah. Para Da'i mempunyai peran besar dalam membentuk karakter moral, spiritual, dan sosial masyarakat.
2. Pembentukan rumah ibadah paripurna di setiap kecamatan
Sebagai daerah dengan kondisi majemuk dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan perbedaan agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsi lembaga keagamaan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pembentukan Rumah Ibadah Paripurna di setiap kecamatan, sebagai pusat pembinaan, pelayanan, dan penguatan umat beragama secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah khususnya program Relegius (**Ber-Ahlak dan Toleransi**), Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Renstra Tahun 2025-2029 berupaya mewujudkan dan mengakomodir dengan menjadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai kinerja yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program secara lebih rinci dan teknis.

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026**

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
1	2	3		
1.	Jumlah Da'i yang mendapatkan honorarium	Jumlah	134	IKK
2.	Jumlah Tentang Imam Masjid, Guru Ngaji Dan Kaum Masjid Desa/Kelurahan yang mendapatkan honorarium	Jumlah	6779	IKK
3.	Jumlah petugas pemandian jenazah yang mendapatkan honorarium	Jumlah	2000	IKK
4.	Jumlah rumah ibadah yang di tetapkan sebagai rumah ibadah paripurna	Jumlah	3	IKK

BAB V

PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksi, tidak mengalami kendala yang berarti. Permasalahan yang dihadapi hanya karena keterbatasan pagu anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan seoptimal mungkin untuk menunjang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut mengharuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada pada setiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan target kinerja dan program prioritas Tahun 2026 sebagai acuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-P) untuk tahun anggaran 2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Rancangan Perubahan Renja ini merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan diambil disertai dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga merupakan salah satu dasar untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan Renja Tahun 2026. Dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan masing-masing Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional serta Staf pelaksana selama 3 (Tiga) bulan tahun 2026, dan diharapkan kedepan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan, Terima kasih.

Kuala Tungkal, Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH, S.STP,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200112 1 001